

## PENGEMBANGAN INDUSTRI LOBSTER NASIONAL

Yuni Sudarwati

19

### Abstrak

*Ekspor benur menjadi kontroversi karena pertimbangan ekonomis dan kelestarian alam. Pendukung ekspor menyatakan bahwa dengan ekspor akan mengurangi penyelundupan benur serta membantu nelayan penangkap. Pendukung ditutupnya ekspor menyatakan, menjual benur sangat merugikan karena nilai jual lobster konsumsi berkali lipat dibanding benur. Kelestarian alam terkait ketersediaan benur juga menjadi prioritas. Namun ternyata pilihan membudidayakan dan membesarkan benur di dalam negeri bukan semudah membalikan telapak tangan. Tulisan ini mengkaji bagaimana sebaiknya upaya dilakukan untuk mengembangkan industri lobster nasional. Pengembangan industri lobster nasional membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah antara lain dalam pengembangan pakan, modal, riset dan transfer teknologi, dan pembenihan. DPR RI, terutama Komisi IV, harus memastikan dan mengawasi bahwa pengembangan industri lobster tetap berpegang pada keberlanjutan sumber daya serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.*

### Pendahuluan

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada 25 November 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap perizinan ekspor benur (benih lobster) tahun 2020 merupakan momentum untuk melihat kembali kondisi industri lobster nasional. Kasus di atas erat kaitannya dengan pembukaan perijinan ekspor benur. Ekspor benur dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain mengurangi penyelundupan, memanfaatkan peluang ekonomi dari penangkapan benur terutama

demi menyelamatkan nelayan tangkap. Memang semenjak ditutupnya keran ekspor, penyelundupan semakin marak, nelayan penangkap juga mengeluhkan karena tidak mendapatkan penghasilan. Namun apakah benar pembukaan ekspor benur adalah satu-satunya solusi?

Di sisi lain, perspektif penutupan ekspor didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan ekosistem dan penguatan industri lobster di dalam negeri. Nilai lobster konsumsi jauh lebih tinggi dibandingkan benur, sehingga lebih menguntungkan jika Indonesia mengekspor lobster bukan benur.



Susi Pudjiastuti menyatakan, meskipun benur berukuran kecil, namun harga jualnya memiliki nilai fantastis. Satu paket bibit lobster berisikan 8.000 ekor bila tidak diekspor harganya mencapai miliaran rupiah. Bahkan, bila benih lobster ini tetap terpelihara di alamnya, maka harganya setara dengan 20 motor Harley Davidson (intisari.grid.id, 15 Desember 2019). Namun sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum mampu melakukan budi daya benur menjadi lobster. Indonesia masih mengandalkan alam dalam pembesaran lobster.

Kedua perspektif baik membuka maupun menutup ekspor benur berpijak atas nama kepentingan bersama. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana sebaiknya upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan industri lobster nasional. Apakah dengan membuka atau menutup ekspor benur? Bagaimana dukungan pemerintah agar pilihan membuka atau menutup menjadi hal yang baik bagi kemakmuran masyarakat dan kelestarian lingkungan?

### **Gambaran Terkini Ekspor Lobster Indonesia**

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang melakukan ekspor lobster dengan posisi terbesar ke-17 eksportir dunia. Namun demikian, untuk di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan negara utama sebagai eksportir lobster dunia. (Suhana, 24 April 2019). Data BPS 2019 menunjukkan bahwa dalam periode Triwulan 1 tahun 2014-2019 nilai ekspor komoditas lobster Indonesia rata-rata tumbuh 3,54% pertahun, sementara volume ekspor

turun sebesar 10,55% per tahun. Nilai ekspor lobster Triwulan 1 tahun 2019 mencapai USD7,09 juta atau naik 0,69% dibandingkan tahun 2018.

Dilihat dari sisi bentuk produk yang diekspor, dalam periode Triwulan 1 tahun 2014-2019 komoditas lobster Indonesia yang diekspor sebagian besar dalam bentuk hidup dan beku. Pada Triwulan 1 tahun 2019 terlihat bahwa 72,76% volume ekspor lobster bersumber dari lobster hidup, sementara lobster beku mencapai 24,60%. Nilai ekspor lobster hidup pada Triwulan 1 tahun 2019 mencapai 85,01% (Suhana, 7 Mei 2019).

Beberapa data tersebut menunjukkan bahwa lobster layak menjadi salah satu sumber penyumbang devisa negara. Namun ternyata, potensi lobster tidak hanya sebatas itu. Jika ditelusur lebih jauh, nilai ekonomis lobster sangatlah besar karena dalam tubuh lobster memiliki kandungan senyawa bernilai jual tinggi di pasaran.

*Pertama*, bagian kepala yang mengandung hidrolisat protein yang dapat digunakan untuk memperbaiki karakteristik berbagai produk pangan dan juga sebagai penyedap rasa. Dalam bidang farmasi dapat digunakan dalam pembuatan produk-produk dermatologis, seperti krim pembersih muka dan krim pelembab kulit (Nurhayati, et.al, 2007)

*Kedua*, bagian hati lobster mengandung lipid dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Uniknya, asam lemak dari hati lobster juga memiliki kandungan omega-3 yang tinggi. Suatu senyawa yang mampu memicu

perkembangan otak anak pada usia *golden age* (Ardiansyah, 25 Desember 2019)

*Ketiga*, bagian cangkang lobster yang mengandung kitin dan kitosan. Kitin mempunyai kegunaan yang sangat luas, tercatat sekitar 200 jenis penggunaannya, dari industri pangan, bioteknologi, farmasi dan kedokteran, serta lingkungan. Setidaknya di industri penjernihan air, kitin telah banyak dikenal sebagai bahan penjernih, demikian juga dalam industri minuman. Kitosan banyak digunakan dalam berbagai industri, antara lain: industri farmasi, kesehatan, biokimia, bioteknologi, pangan, pengolahan limbah, kosmetik, agroindustri, industri tekstil, industri perkayuan, industri kertas dan industri elektronika (Rupiasih et.al, 2013).

Mengolah limbah lobster menjadi kitin atau kitosan akan memberikan nilai tambah yang cukup tinggi. Kitosan memiliki nilai pasar sebesar USD 5,71 milyar pada tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat hingga USD 21,41 milyar pada tahun 2025 (Ardiansyah, 25 Desember 2019). Sehingga selain mendapatkan keuntungan ekonomi, permasalahan lingkungan terkait limbah juga bisa dikurangi.

Nilai ekonomis lobster dan limbah lobster tentu jauh berbeda dengan nilai ekonomis benur. Nilai ekspor benur semenjak ekspor dibuka pada Juni 2020 sebesar 32 kilogram dengan nilai sekitar Rp1,6 miliar dan pada Juli menjadi Rp51 miliar (1.389 kilogram). Pada Agustus menjadi lebih dari Rp90 miliar (4.216 kilogram) dengan negara pengimpor utama adalah Taiwan dan Vietnam (bbc.com,

25 November 2020). Oleh karena itu, membuka ekspor benur dalam jangka panjang akan merugikan karena secara nilai ekonomis dari lobster itu sendiri serta potensi pemanfaatan limbah lobster akan hilang.

### **Peran Pemerintah**

Nelayan memilih menangkap benur karena lebih mudah, lebih menguntungkan, dan tidak beresiko dibandingkan melaut untuk mencari ikan. Di samping keterbatasan alat dan teknologi yang dimiliki. Dengan hanya menebar alat tangkap di tepi karang dalam semalam nelayan akan mendapatkan benur yang dapat dijual dengan harga tinggi lebih tinggi dari harga jual ikan.

Pilihan untuk membuka ekspor benur demi kehidupan nelayan sepertinya bukan pilihan bijak. Pemerintah bisa memberikan bantuan alat dan teknologi untuk menangkap ikan, untuk menangkap lobster alih-alih membuka ekspor. Mengapa? karena dengan membuka ekspor akan ada kecenderungan untuk eksploitasi benur. Saat ekspor dibuka, harga benur meningkat sehingga nelayan cenderung untuk menangkap lebih banyak. Jika tanpa pengawasan dan pencatatan yang ketat, dikhawatirkan stok benih di alam akan habis. Meski sudah ada peraturan bahwa ekspor benur bisa dilakukan jika sudah melakukan budi daya dan *restocking* 2% dari hasil panen budi daya. Namun dalam kenyataannya sebulan setelah perijinan keluar, ekspor sudah dilaksanakan. Sementara waktu untuk melakukan budi daya minimal adalah 6 bulan. Nelayan pembudidaya juga kesulitan mendapatkan benur karena harga

meningkat tajam. Otomatis upaya budi daya lobster menjadi terhambat sehingga produksi lobster akan sangat tergantung pada lobster tangkap. Sementara lobster sudah ditangkap semenjak jadi benur, bagaimana akan ada lobster siap konsumsi. Kondisi ini harus bisa dipotong oleh pemerintah. Budi daya lobster harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan upaya pencatatan hasil penangkapan benih di setiap lokasi dan penelaahan berkala terhadap kondisi stok benih lobster di alam.

Saat ini, budi daya lobster yang dilakukan di Indonesia masih sebatas pembesaran lobster, belum mencapai ke pembiakan. Budi daya pembesaran itupun juga masih mengalami banyak permasalahan. Mulai dari tingkat kematian tinggi benur saat pembesaran, permasalahan pakan, dan waktu pembesaran yang cukup lama. Sehingga tidak salah ketika pasokan lobster Indonesia didominasi dari hasil tangkapan bukan hasil budi daya. Indonesia juga benar-benar mengandalkan alam dalam pembesaran lobster. Kondisi ini tentu saja sangat riskan dan mengkhawatirkan apalagi jika memang kemudian stok benur habis.

Budi daya pembesaran lobster seharusnya bukan sesuatu yang sulit, tidak membutuhkan banyak biaya, hanya membutuhkan sedikit waktu sekitar 8-12 bulan. Kebutuhan pakan lobster bisa hanya ikan rucah yang bukan untuk konsumsi manusia, daging siput, dan daging kerang. Namun begitu, demi meningkatkan kualitas lobster yang dihasilkan, peningkatan mutu pakan juga harus dilakukan. Jika selama ini masih berbasis

pakan ikan rucah yang musiman, mutu tidak standar, dan pembawa penyakit (*pathogen carrier*), maka pemerintah harus memfasilitasi untuk pembuatan pakan yang lebih baik sehingga menghasilkan lobster yang berkualitas tinggi. Pemerintah seharusnya mendorong dan memfasilitasi riset pengembangan pakan lobster sehingga kualitas lobster yang dihasilkan dapat lebih bagus. Waktu untuk mencapai berat lobster yang diharapkan juga tidak terlalu lama, sehingga masa tunggu nelayan bisa dipercepat.

Biaya atau modal besar biasanya dibutuhkan dalam masa tunggu benih lobster menjadi lobster dewasa. Selama ini nelayan lebih memilih melaut karena hasilnya langsung bisa dirasakan. Nelayan tidak mungkin hanya menunggu tanpa penghasilan dari benih ditebar untuk menjadi lobster, oleh karena itu butuh campur tangan pemerintah. Kehadiran pemerintah dengan bantuan modal sangat dibutuhkan pada tahapan ini di samping memberikan alternatif mata pencaharian beserta pendampingan serta insentif pendapatan untuk kelompok nelayan ini. Meski memang ada beberapa kelompok nelayan yang malah menjadikan budi daya lobster sebagai pekerjaan sampingan selain nelayan dan buruh.

Keuntungan lain dari pilihan untuk melakukan budi daya lobster adalah bahwa budi daya akan menggerakkan perekonomian. Hal ini karena budi daya membutuhkan usaha perbesaran benih, penyediaan pakan, perdagangan dan ekspor, serta distribusi dan transportasi. Semua aktivitas ekonomi ini tentu saja memerlukan tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.

Selain akses permodalan, perlu adopsi teknologi budi daya lobster dari riset-riset bagi nelayan. Riset-riset untuk pengembangan komoditas ekonomis penting terus dilakukan dan diberi target untuk mendapatkan hasil atau inovasi yang berguna bagi pengembangan lobster di Indonesia, seperti riset untuk pengembangan pakan dan riset untuk menekan tingkat kematian benur saat budi daya. Jika perlu undang investor Vietnam untuk membudidayakan lobster di Indonesia agar terjadi transfer teknologi.

Hal terakhir yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mengembangkan pusat pembenihan lobster (*hatchery*) guna menekan penangkapan agar stok di alam tetap terjaga seimbang. *Hatchery* ini menjadi sangat penting untuk segera dikembangkan karena sampai saat ini budi daya yang dilakukan masih sebatas pembesaran, bukan pada pembenihan atau pembiakan. Indonesia juga belum menguasai pembiakan artificial (*artificial breeding*). Pembiakan lobster sepenuhnya masih mengandalkan alam yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sehingga jika suatu saat benih habis, maka bisa dipastikan produksi lobster Indonesia akan terhenti.

### **Penutup**

Penghentian ekspor benih lobster menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan di sektor perikanan. Sudah seharusnya Indonesia bangkit jadi pemain besar lobster dan menyalip Vietnam yang selama ini menggantungkan 80% pasokan benih dari Indonesia. Pembukaan atau penutupan ekspor semuanya harus berpijak pada kepentingan bersama. Pembukaan penangkapan seharusnya

untuk mendorong dilakukannya budi daya yang tentu saja dengan tetap memperhatikan kuota penangkapan, bukan pembukaan penangkapan untuk ekspor.

Riset dan fasilitas budi daya perlu diperkuat, terutama teknologi pakan lobster untuk meningkatkan kualitas lobster serta pembiakan *artificial* agar stok di alam tetap terjaga. DPR RI harus memastikan dan mengawasi bahwa pengembangan industri lobster tetap berpegang pada keberlanjutan sumber daya serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.

### **Referensi**

- Ardiansyah, Muhammad Arief. 2020. "Desain Nilai Tambah untuk Lobster yang Tak Berdosa", 25 Desember 2019, <https://www.kompasiana.com/arielfardia/e031c55d541df611d169812/desain-nilai-tambah-untuk-lobster-yang-tak-berdosa?>, diakses 30 November 2020.
- "Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat 'Everybody Happy'?", 25 November 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>, diakses 28 November 2020.
- "Ini Dia Analisis Cerdas Bu Susi Sekaligus Alasan Kenapa Dia Menyayangkan Edhi Prabowo Buka Ekspor Bibit Lobster, Kalau Sudah Dewasa Lebih Mahal Daripada Motor Harley Davidson!", 15 Desember 2019, <https://intisari.grid.id/read/031954703/ini-dia-analisis-cerdas-bu-susi-sekaligus-alasan-kenapa-dia-menyayangkan-edhi-prabowo-buka-ekspor-bibit-lobster-kalau-sudah-dewasa->

- lebih-mahal-daripada-motor-ha?, diakses 28 November 2020.
- Nurhayati, T., Salamah, E., dan Hidayat, T. 2007. "Karakteristik Hidrolisat Protein Ikan Selar (Caranx Leptolepis) yang Diproses secara Enzimatis". *Buletin Teknologi Hasil Pertanian*. Vol X No. 1 Tahun 2007.
- Rupiasih, Ni Nyoman., Sumadiyasa, Made., Windari, Ni Nyoman Putri. 2014. "Pemanfaatan Limbah Kulit Udang (Lobster Air Laut) sebagai Bahan Baku Pembuatan Membran Penyaring Limbah Radiografi". *Hasil Penelitian*, 24 November 2014, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_riwayat\\_penelitian\\_1\\_dir/80c009f1db45a3c7c7d8da71646f2390.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_riwayat_penelitian_1_dir/80c009f1db45a3c7c7d8da71646f2390.pdf), diakses 28 November 2020.
- Suhana. 2019. "Lobstereconomics (1) Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster", 24 April 2019, <https://suhana.web.id/2019/04/24/lobsternomics-1-menjaga-keberlanjutan-ekonomi-lobster/>, diakses 28 November 2020.
- Suhana. 2019. "Lobstereconomics (2): Kinerja Ekspor Lobster Triwulan 1 2019", 7 Mei 2019, <https://suhana.web.id/2019/05/07/lobsternomics-2-kinerja-ekspor-lobster-triwulan-1-2019/>, diakses 28 November 2020.



Yuni Sudarwati  
[yuni.sudarwati@dpr.go.id](mailto:yuni.sudarwati@dpr.go.id)

Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si., menyelesaikan pendidikan Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Manajemen di Magister Sains Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan kepakaran Manajemen Industri.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.